

Modernisasi Pendidikan Melalui Desentralisasi: Studi Literatur Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan

Utari Pratiwi¹, Firman², Nurfarhanah³

*Universitas Negeri Padang,

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May, 2025

Revised May 30, 2025

Accepted June 15, 2025

Available online June 23, 2025

Kata kunci:

Rational Emotive Behavior Therapy,
Konseling Kelompok, Keyakinan
Irasional

Keywords:

Rational Emotive Behavior Therapy,
Group Counseling, Irrational Beliefs



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author.
Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu strategi utama dalam modernisasi sistem pendidikan di Indonesia, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan melalui kebijakan desentralisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil studi menunjukkan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap peningkatan mutu, relevansi, dan pemerataan akses pendidikan melalui adaptasi kurikulum lokal, penerapan manajemen berbasis sekolah, serta pelatihan guru yang sesuai dengan konteks daerah. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya, pengalokasian anggaran, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan kualitas antar daerah, keterbatasan tenaga profesional, dan hambatan birokrasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan regulasi yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

ABSTRACT

Educational decentralization is a key strategy in the modernization of Indonesia's education system, granting greater authority to local governments to manage and develop education based on regional needs. This study aims to examine the strategic role of local governments in educational development through decentralization policies, as well as the challenges faced in their implementation. The findings indicate that decentralization contributes to improving the quality, relevance, and equity of educational access through localized curriculum adaptation, the implementation of school-based management, and teacher training tailored to local contexts. Local governments also play a crucial role in resource management, budget allocation, and the development of educational infrastructure. However, challenges such as disparities in educational quality among regions, limited professional human resources, and bureaucratic obstacles remain to be addressed. This study emphasizes that the success of educational decentralization depends heavily on the synergy between central and local governments, strong legal frameworks, and active community participation. Therefore, decentralization can serve as a driving force in establishing an inclusive, adaptive, and globally competitive education system.

PENDAHULUAN

Modernisasi pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan globalisasi. Konsep modernisasi pendidikan menekankan transformasi sistem pendidikan dari yang tradisional menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Paryanto et al., 2022). Proses ini melibatkan pembaruan kurikulum, metode pembelajaran, serta pengelolaan pendidikan yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan sosial. Di Indonesia, modernisasi pendidikan juga berkaitan erat dengan upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional (Yuniarti et al., 2022). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan keterampilan yang mampu bersaing di era modern. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan menjadi agenda penting yang harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah (Gusti & Masduki, 2022).

Salah satu aspek penting dalam modernisasi pendidikan adalah desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (SYARIFUDDIN et al., 2021). Desentralisasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan pendidikan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, sehingga hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan (Sukomardojo, 2023).

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan menjadi sangat strategis karena mereka lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di wilayahnya (Fauzi et al., 2024). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. Namun, implementasi desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, ketimpangan anggaran, dan koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah (Rozak & Az-Ziyadah, 2021). Tantangan ini perlu mendapat perhatian serius agar modernisasi pendidikan melalui desentralisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.

Studi literatur menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan dinamika lembaga pendidikan Islam modern yang berperan besar dalam transformasi sistem pendidikan nasional. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah melakukan berbagai pembaharuan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern, serta mengadopsi sistem manajemen pendidikan yang lebih sistematis (Subasman & Nasyiruddin, 2024). Modernisasi pendidikan yang digagas oleh organisasi-organisasi tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan tidak hanya soal teknologi atau kurikulum, tetapi juga menyangkut aspek budaya dan nilai-nilai sosial yang harus disesuaikan dengan konteks lokal (Ridwan & Sumirat, 2021).

Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai modernisasi dengan kearifan lokal sehingga pendidikan yang dikembangkan tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga relevan dan berakar kuat pada budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, kajian tentang modernisasi pendidikan melalui desentralisasi dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik pendidikan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan melalui proses desentralisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik modernisasi pendidikan dan desentralisasi. Proses pengumpulan data meliputi pencarian kata kunci yang spesifik, seleksi sumber yang kredibel, serta pencatatan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh untuk dianalisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasi dan mensintesis hasil telaah pustaka untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi yang berdampak pada modernisasi pendidikan. Tahapan analisis meliputi identifikasi tema utama, pengelompokan data berdasarkan aspek kebijakan dan praktik, serta penyajian hasil secara naratif yang mendalam. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Desentralisasi Pendidikan Untuk Mendukung Modernisasi Sistem Pendidikan Di Daerah

Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi pendidikan sangat krusial

untuk mendukung modernisasi sistem pendidikan di daerah. Dengan diberikannya otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Sumpena et al., 2022). Hal ini memungkinkan kebijakan pendidikan yang lebih relevan dan responsif terhadap kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan secara signifikan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi dan budaya daerah masing-masing. Selain itu, mereka juga mengelola sumber daya manusia, termasuk pelatihan guru dan pengembangan manajemen sekolah berbasis komunitas (Rosmana et al., 2023). Model manajemen berbasis sekolah (MBS) yang diadopsi dalam desentralisasi memberikan ruang bagi sekolah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, yang pada akhirnya mendukung modernisasi pendidikan di daerah.

Namun, implementasi desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah disparitas kualitas pendidikan antar daerah yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dana dan tenaga pendidik yang kompeten, sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi (Setiawan et al., 2022). Selain itu, birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan yang perlu diatasi agar modernisasi pendidikan dapat berjalan efektif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan pendidikan melalui pelatihan, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Ilham et al., 2023). Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pendidikan yang modern dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah dalam desentralisasi pendidikan merupakan fondasi penting dalam proses modernisasi sistem pendidikan. Dengan otonomi yang diberikan, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan inovatif sesuai kebutuhan lokal. Jika tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik, desentralisasi pendidikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara merata dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang kompeten di daerah.

Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendidikan Secara Desentralistik Guna Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Pendidikan

Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengelola pendidikan secara desentralistik guna meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antar daerah yang masih cukup lebar (Hilmin et al., 2022). Beberapa daerah memiliki sumber daya yang memadai, sementara daerah lain mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas, tenaga pendidik yang berkualitas, dan infrastruktur pendidikan. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan akses dan mutu pendidikan yang sulit diatasi tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Banyak daerah belum memiliki tenaga pendidik dan pengelola pendidikan yang terlatih secara profesional sehingga pengelolaan pendidikan belum optimal (Kholidin & Kodriyah, 2025). Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Dari sisi birokrasi dan koordinasi antar pemerintahan, masih terdapat kelemahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan desentralisasi. Koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyebabkan kebijakan pendidikan terkadang tumpang tindih atau tidak berjalan sinergis (Hantoro et al., 2022). Hal ini juga berimbas pada pengelolaan anggaran pendidikan yang masih bergantung pada dana pusat dan provinsi, sehingga otonomi keuangan daerah dalam pendidikan belum sepenuhnya optimal.

Meski demikian, desentralisasi pendidikan juga membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang lebih relevan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat (Hantoro et al., 2022). Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam pengelolaan pendidikan juga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap pendidikan, sehingga efektivitas dan relevansi pendidikan dapat lebih terjamin.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem monitoring dan

evaluasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Inovasi kebijakan dan regulasi yang mendukung kesejahteraan guru dan profesionalisme tenaga pendidik juga menjadi kunci penting agar desentralisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan berdampak positif pada mutu pendidikan secara menyeluruh.

Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Dengan alih kelola ini, daerah diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan (Setiawan et al., 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi landasan hukum yang memperkuat pemberian kewenangan tersebut, termasuk manajemen berbasis sekolah yang memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan internalnya.

Efektivitas desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada komitmen dan dukungan politik dari pemerintah daerah, terutama kepala daerah, dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya (Rosmana et al., 2023). Daerah dengan APBD yang memadai mampu membangun sarana prasarana pendidikan dan mendistribusikan guru secara lebih merata, sedangkan daerah dengan keterbatasan anggaran menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Ilham et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga kemampuan daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan juga meningkat melalui desentralisasi. Dengan kewenangan yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dapat melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan sektor swasta dalam proses perencanaan dan pengawasan pendidikan (Sumpena et al., 2022). Hal ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan pendidikan di daerah masing-masing. Namun, partisipasi ini perlu didukung dengan transparansi dan akuntabilitas agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat berjalan efektif.

Dalam aspek kemandirian daerah, desentralisasi memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ini mendukung relevansi pendidikan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di tingkat daerah (Subasman & Nasyiruddin, 2024). Namun, disparitas kualitas antar daerah masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan dan pemerataan sumber daya, agar kemandirian tidak berujung pada ketimpangan.

Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan politik, pengelolaan anggaran yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan sinergi yang baik, desentralisasi dapat mendorong peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Modernisasi pendidikan melalui desentralisasi menandai pergeseran penting dari pengelolaan pendidikan yang sentralistik menuju pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, penetapan kurikulum, dan pengembangan kapasitas guru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi, mutu, dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah, sehingga pendidikan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan melalui desentralisasi sangat strategis. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pendidikan, pelatihan guru, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan kewenangan ini, daerah dapat lebih cepat merespon kebutuhan pendidikan khusus dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti disparitas kualitas antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan birokrasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar desentralisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meski demikian, desentralisasi pendidikan membuka peluang besar untuk inovasi dan diversifikasi kurikulum yang mempertahankan kearifan lokal sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, menjadi kunci keberhasilan modernisasi pendidikan ini. Dengan komitmen yang kuat dan pengelolaan yang baik, desentralisasi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan

berkualitas, inklusif, dan berkeadilan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia dan daya saing bangsa secara menyeluruh.

REFERENSI

- Fauzi, M. S., Maq, M. M., Rukmini, A., Arsyad, M., Prayogi, A., & Ahyani, E. (2024). Kurikulum Merdeka Dalam Kerangka Akses Pendidikan: Tinjauan Literatur Atas Inisiatif Unicef Dan Pemerintah Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 635–643.
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40.
- Hantoro, R. R., Rosnawati, R., Saripuddin, S., Milasari, M., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2022). Modernisasi dan Enkulturas Budaya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 473.
- Hilmin, H., Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan kurikulum merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162.
- Ilham, D., Karunia, L., Saleh, S., & Brata, J. T. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 155–162.
- Kholidin, A., & Kodriyah, I. (2025). Transformasi Pemikiran Pendidikan Islam di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 12.
- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150–164.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2023). Upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 405–418.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim| Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84.
- Subasman, I., & Nasyiruddin, F. (2024). Sistem Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter: Evaluasi Program Ajengan Masuk Sekolah Di Pangandaran. *Journal on Education*, 6(4), 18147–18160.
- Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*, 5(2), 205–214.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51.
- SYARIFUDDIN, S., ILYAS, J. B., & SANI, A. (2021). Pengaruh Persepsi Pendidikan & Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Dinas Kota Makassar. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2).
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182–207.

